

**PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENGELUARAN KAS PADAPT. ANGKASA PURA II PEKANBARU
DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD**

Noprizza^{1*}, Wulan Rahma Dewi²

¹ Mahasiswa, Universitas Terbuka

² Dosen Tetap Universitas Insan Pembangunan Indonesia

*Penulis Korespondensi:noprizza2014@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.58217/joceip.v20i1.177>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas dan mengidentifikasi kerentanan yang berpotensi menimbulkan *fraud* di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam terhadap empat informan kunci (manajer keuangan, supervisor akuntansi, dan dua staf kas), observasi proses pengeluaran kas, serta analisis dokumen kebijakan internal dan laporan audit tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah memiliki struktur pengendalian internal yang formal, terdapat kelemahan operasional yang signifikan, meliputi: belum optimalnya pemisahan tugas dalam pengeluaran kas kecil (*petty cash*), ketiadaan petugas investigasi *fraud* khusus, rendahnya partisipasi karyawan dalam *whistleblowing system*, serta pemantauan yang belum proaktif dan berkala. Kesimpulannya, penerapan pengendalian internal pengeluaran kas di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru belum sepenuhnya efektif. Kelemahan utama terletak pada aspek implementasi dan kepatuhan, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap potensi *fraud*. Diperlukan penguatan pada aktivitas pengendalian dan pemantauan sesuai kerangka COSO untuk meminimalkan risiko tersebut.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas, Pencegahan Kecurangan, Sistem Pelaporan (*Whistleblowing*), Kerangka COSO

PENDAHULUAN

Sistem pengendalian internal merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam mengamankan aset dan mencegah penyimpangan. Penerapannya pada siklus pengeluaran kas menjadi sangat krusial bagi perusahaan, khususnya pada sektor yang memiliki likuiditas tinggi seperti jasa kebandarudaraan.

Penelitian berfokus pada PT. Angkasa Pura (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru, yang mengelola Bandara Sultan Syarif Kasim II. Pada unit ini, pengelolaan kas (baik kas besar maupun kas kecil/*petty cash*) memerlukan pengendalian yang ketat mengingat volume transaksi harian yang signifikan dan keragaman jenis pengeluaran operasional.

Menurut Hery (2013), pengendalian internal berfungsi sebagai alat kebijakan atau

prosedur yang melindungi aset perusahaan dari kecurangan (*fraud*) dan memastikan ketersediaan informasi akuntansi yang valid. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap kebijakan dan ketelitian dalam implementasi, yang dalam praktik sering kali menjadi titik lemah. Cela inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan, terutama pada pengelolaan kas yang bersifat rutin dan likuid.

Penelitian Amrizal, Ak, MM, CFE (yang dapat diakses melalui www.bpkp.go.id) mengungkapkan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko bisnis. Salah satu di antaranya adalah risiko kecurangan yang termasuk dalam kategori risiko integritas. Sejalan dengan itu, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE)

mengklasifikasikan penipuan (*fraud*) ke dalam tiga kategori utama, yaitu penipuan akuntansi (*financial statement fraud*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*). Berdasarkan temuan audit internal PT. Angkasa Pura II tahun 2019-2023, 64% akar masalah pada unit operasional berasal dari kelemahan pengendalian internal (data internal perusahaan, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya kerentanan dalam sistem yang dapat berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan *fraud*, khususnya dalam siklus pengeluaran kas yang bersifat rutin dan berjumlah relatif kecil.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), struktur pengendalian internal terdiri atas lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Apabila kelima komponen tersebut beroperasi dan berfungsi secara optimal, risiko kecurangan yang tidak terdeteksi dapat diminimalkan secara signifikan. Oleh karena itu, kerangka COSO sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, termasuk dalam siklus pengeluaran kas.

Secara umum, sistem pengendalian internal sangat berkaitan dengan keakuratan penerimaan dan penggunaan dana. Meskipun kerangka COSO telah banyak diadopsi secara teoretis, penelitian yang mengaplikasikannya secara spesifik untuk mengevaluasi pengendalian internal pengeluaran kas, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi udara di tingkat cabang seperti PT. Angkasa Pura II Pekanbaru masih terbatas. Kesenjangan ini penting mengingat karakteristik operasional, regulasi, dan profil risiko *fraud* yang unik pada unit tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru berdasarkan kerangka COSO. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana efektivitas penerapan lima komponen pengendalian internal COSO pada siklus pengeluaran kas di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru, serta apa saja kerentanan yang

berpotensi menyebabkan *fraud*?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Desain ini dipilih untuk memahami fenomena penerapan pengendalian internal pengeluaran kas secara mendalam di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), Sumber informasi ataupun data digunakan untuk penelitian merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari rangkuman penelitian yang terdahulu dan pendapat para ahli.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi teknik untuk meningkatkan keabsahan data, meliputi:

1. Wawancara Semi-Terstruktur: Dilakukan terhadap empat (4) informan kunci yang dipilih secara *purposive*, berdasarkan kedalaman pengetahuan tentang proses pengeluaran kas. Informan terdiri dari:
 - a) Manajer Keuangan
 - b) Supervisor Akuntansi
 - c) Dua (2) Staf Bagian Kas

Wawancara dilaksanakan pada Oktober hingga November 2023.
2. Observasi Partisipatif Pasif: Peneliti mengamati langsung proses pengeluaran kas, khususnya untuk kas kecil dan pembayaran rutin, tanpa terlibat aktif dalam kegiatan.
3. Studi Dokumen: Menganalisis dokumen internal perusahaan, yaitu:
 - a) Kebijakan Pengendalian Internal (Kode:DKO4 0362006020448422014)
 - b) Pedoman *Whistleblowing System* (KEP.02.03.01/01/2014.2)
 - c) Laporan Hasil Audit Internal periode 2019-2023
 - d) Catatan transaksi kas dan laporan keuangan terkait.

Teknis Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tahapan:

1. Reduksi Data: Menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data mentah dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik berdasarkan kelima komponen kerangka COSO.
3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi: Menarik makna dari data yang disajikan dan melakukan verifikasi melalui *member checking* dengan informan untuk memastikan keakuratan interpretasi.

Keabsahan Data (Trustworthiness)

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen.
2. Triangulasi Teknik: Menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data (wawancara, observasi, studi dokumen).
3. Member Checking: Mengonfirmasi hasil interpretasi data kepada informan untuk meminimalkan bias.
4. Audit Trail: Mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci untuk memungkinkan pelacakan dan pemeriksaan ulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi PT. Angkasa Pura II

PT. Angkasa Pura II (Persero) adalah BUMN di bawah Kementerian Perhubungan. Penelitian ini berfokus pada Kantor Cabang Pekanbaru yang mengoperasikan Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II. Unit ini memiliki departemen keuangan mandiri yang mengelola seluruh siklus pengeluaran kas, baik untuk transaksi besar maupun kas kecil (*petty cash*). Volume transaksi harian yang tinggi menjadikan pengendalian internal atas pengeluaran kas sebagai aspek penting dalam tata kelola keuangan cabang ini.

B. Analisis Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas PT. Angkasa Pura II di Pekanbaru

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang

diajukan, analisis ini dilakukan dengan mengacu pada lima komponen kerangka COSO untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pengeluaran kas sekaligus mengidentifikasi kerentanan yang berpotensi memicu terjadinya kecurangan.

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merujuk pada suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian para anggotanya. Di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru, secara formal telah terdapat struktur organisasi yang jelas dan seperangkat kebijakan yang mendukung, seperti Keputusan Direksi mengenai Pengendalian Internal. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan tertulis dengan pemahaman dan komitmen di tingkat pelaksana. Hasil wawancara dengan staf operasional mengungkapkan bahwa sosialisasi kebijakan ini cenderung terbatas. Seorang staf di bagian keuangan menyatakan, "*Kami mengetahui adanya aturan tentang pelaporan dan pengendalian, tetapi detail prosedur dan contoh penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari tidak pernah dibahas secara khusus.*" Pernyataan ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi yang menekankan integritas dan kepatuhan belum sepenuhnya meresap hingga ke level staf, yang dapat melemahkan fondasi dari seluruh sistem pengendalian.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi. Perusahaan telah menunjukkan kesadaran akan risiko penyalahgunaan kas dengan menerapkan kebijakan otorisasi berdasarkan nominal transaksi. Misalnya, transaksi di atas Rp 5.000.000 memerlukan persetujuan kepala departemen keuangan dan direksi keuangan. Meski demikian, proses penilaian risiko yang berjalan tampaknya lebih bersifat rutin dan formalitas, kurang bersifat proaktif dan dinamis. Hal ini tercermin dari data internal perusahaan. Analisis terhadap laporan audit internal kantor cabang selama periode 2020 hingga 2023 menemukan pola yang konsisten.

Tabel 1. Komposisi Temuan Penyebab Terjadinya Masalah

Sumber Penyebab	Percentase
Kelemahan Pengendalian Internal	64 %
Kualitas Perencanaan	12 %
Ketidakpatuhan Terhadap SOP (Standar Operasional dan Prosedur)	9 %
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	15 %

Sumber: Data Internal PT. Angkasa Pura II di Pekanbaru, 2023

Fakta bahwa 64% temuan audit berakar dari kelemahan pengendalian internal merupakan indikator kuat bahwa penilaian risiko yang selama ini dilakukan belum berhasil mengidentifikasi dan memitigasi kerentanan sistemik secara efektif. Risiko tersebut terus berulang dari tahun ke tahun.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Pada komponen inilah beberapa kelemahan implementasi paling nyata ditemukan, khususnya terkait dua prinsip utama: pemisahan tugas dan otorisasi.
 - a. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*)
Secara kebijakan, fungsi otorisasi, pelaksanaan pembayaran, dan pencatatan akuntansi telah dipisahkan. Namun, dalam praktik operasional sehari-hari, terutama untuk pengeluaran kas kecil, prinsip ini sering tidak diterapkan. Observasi peneliti pada proses pengeluaran kas kecil menemukan bahwa dalam beberapa kesempatan, seorang staf administrasi bertindak sekaligus sebagai pemohon, pihak yang menerima persetujuan verbal dari atasan, dan yang mengambil uang dari petugas kasir. Ketika ditanya mengenai hal ini, salah seorang staf menjelaskan, “Iya, memang idealnya berbeda orang. Tapi kalau untuk keperluan mendesak dan nominalnya tidak besar, sering praktiknya seperti ini agar cepat selesai. Kasirnya juga tahu ini untuk kepentingan dinas.”

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
 - b. Sistem Otorisasi (*Authorization*)
Kebijakan otorisasi bertingkat untuk

transaksi besar umumnya diikuti. Kendati demikian, kelemahan muncul pada proses verifikasi. Pengamatan terhadap dokumen pengeluaran menunjukkan bahwa tanda tangan atau paraf persetujuan seringkali telah diberikan tanpa pemeriksaan mendetail terhadap kelengkapan bukti pendukung. Seorang supervisor mengakui, “*Kadang karena banyaknya dokumen yang harus disetujui dan waktu yang terbatas, fokusnya lebih pada nominal dan keperluannya saja. Pengecekan faktur atau kwitansi detailnya mungkin kurang.*” Kelemahan dalam aktivitas pengendalian yang mendasar ini menciptakan celah yang dapat dieksplorasi, misalnya untuk pengajuan reimbursement yang digelembungkan (*expense reimbursement fraud*).

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi dan komunikasi bertujuan untuk menangkap dan menyebarkan informasi terkait pengendalian. Perusahaan telah memiliki saluran komunikasi formal untuk pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* yang diatur dalam Surat Direksi dan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Edisi: KEP.02.03.01/01/2014.2 yaitu Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di PT Angkasa Pura II (Persero). Akan tetapi, efektivitas sistem ini sangat dipertanyakan.

Data internal menunjukkan bahwa partisipasi karyawan dalam menggunakan saluran ini sangat rendah. Wawancara mengungkap akar masalahnya: ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Seorang karyawan dengan pengalaman lebih dari lima tahun menyatakan, “*Saya pribadi tidak pernah melapor lewat jalur itu. Khawatir malah jadi bahan pembicaraan atau justru saya yang disalahkan. Lebih aman diam atau kalau sangat serius, bicara langsung kepada atasan yang dipercaya.*” Pernyataan ini menggarisbawahi kegagalan komunikasi dalam menciptakan persepsi bahwa saluran pelaporan merupakan mekanisme yang aman, terlindungi, dan efektif.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses yang menilai

kualitas kinerja pengendalian internal seiring waktu. Aktivitas pemantauan utama di kantor cabang dilakukan melalui fungsi audit internal. Hasil audit tersebut memberikan gambaran distribusi temuan sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Temuan Direktorat

Direktorat	Percentase
Keuangan	35 %
Komersial Kebandarudaraan	15%
Operasi Kebandarudaraan	20%
Pengembangan	15 %
Kebandarudaraan	
Sumber Daya Manusia	15 %

Sumber: Data Internal PT. Angkasa Pura II di Pekanbaru, 2023

Tingginya persentase temuan di bidang keuangan (35%) selaras dengan fokus penelitian pada siklus kas dan mengonfirmasi bahwa area ini memang rentan. Namun, pemantauan yang ada tampaknya belum sepenuhnya berdampak korektif. Tidak ditemukan adanya mekanisme *follow-up* yang terstruktur dan transparan untuk memastikan temuan audit benar-benar ditindaklanjuti. Selain itu, bentuk pemantauan seperti audit mendadak (*surprise audit*) yang khusus menasar proses pengeluaran kas tidak dilakukan, sehingga aktivitas pemantauan lebih bersifat *detective* (mencari kesalahan setelah kejadian) daripada *preventive* (mencegah kesalahan).

C. Identifikasi Kerentanan yang Berpotensi Menyebabkan Fraud

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kelima komponen kerangka COSO, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kerentanan kritis dalam sistem pengendalian internal pengeluaran kas di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru yang secara potensial dapat dieksplorasi untuk tindakan *fraud* antara lain:

1. Konsentrasi Wewenang dalam Pengelolaan Kas Kecil
Pelanggaran prinsip pemisahan tugas pada pengeluaran *petty cash* menciptakan peluang untuk penggelapan dana (*skimming*)

atau pembuatan bukti pengeluaran fiktif. Cela ini memungkinkan seorang karyawan untuk mengendalikan seluruh proses mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencairan tanpa pengawasan memadai.

2. Verifikasi Dokumen yang Lemah
Kurang ketatnya pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran membuka kemungkinan terjadinya penggelembungan biaya (*expense reimbursement fraud*) atau pembayaran kepada vendor fiktif. Sistem otorisasi yang lebih menitikberatkan pada nominal dan kecepatan proses daripada validitas transaksi menjadi titik lemah ini.
3. Budaya Organisasi yang Menghambat Pelaporan
Ketidakefektifan *whistleblowing system* dan rendahnya partisipasi karyawan dalam melapor menciptakan lingkungan di mana indikasi *fraud* tidak terdeteksi dalam waktu lama (*detection lag*). Ketakutan akan represiasi dan kurangnya kepercayaan pada sistem pelaporan menjadikan penyimpangan berpotensi tersembunyi dan berlanjut.
4. Pemantauan yang Dapat Diprediksi dan Tidak Proaktif
Ketiadaan audit mendadak (*surprise audit*) dan mekanisme pemantauan real-time terhadap transaksi kas, khususnya yang bernilai kecil dan rutin, memungkinkan pola penyimpangan yang sistematis tidak teridentifikasi. Pemantauan yang bersifat rutin dan terjadwal mudah diantisipasi oleh pelaku potensial.
5. Tindak Lanjut Temuan yang Tak Konsisten
Lemahnya sistem tindak lanjut atas temuan audit internal menyebabkan kelemahan pengendalian yang sama berpotensi terulang secara periodik, sebagaimana tercermin dari data 64% akar masalah yang terus-menerus berasal dari area yang sama. Hal ini menunjukkan kurangnya perbaikan sistemik yang membuka peluang *fraud* berulang.

Kerentanan-kerentanan ini saling berkaitan

dan membentuk suatu lingkungan risiko yang terakumulasi. Meskipun temuan ini tidak secara langsung membuktikan telah terjadinya *fraud*, namun secara kolektif menciptakan kondisi yang secara signifikan meningkatkan kerawanan organisasi terhadap berbagai skema kecurangan keuangan, terutama yang terkait dengan pengeluaran kas operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru dengan menggunakan kerangka COSO, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan pengendalian internal pengeluaran kas di PT. Angkasa Pura II Pekanbaru belum sepenuhnya efektif. Secara desain (*design adequacy*), perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai (seperti sistem otorisasi bertingkat dan *whistleblowing system*). Namun, efektivitas operasionalnya (*operating effectiveness*) lemah, terutama pada aspek pemisahan tugas dalam pengelolaan kas kecil dan implementasi sistem pelaporan pelanggaran.
2. Terdapat beberapa kerentanan spesifik yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan *fraud*:
 - a. Konsentrasi wewenang dalam proses pengeluaran *petty cash* yang memungkinkan penyalahgunaan dana.
 - b. Verifikasi dokumen yang kurang ketat pada transaksi menengah (Rp 3-5 juta).
 - c. Budaya organisasi yang menghambat pelaporan (*whistleblowing system* tidak efektif karena rendahnya partisipasi karyawan).
 - d. Pemantauan yang bersifat rutin dan dapat diprediksi, tanpa audit mendadak (*surprise audit*) khusus untuk proses kas.
 - e. Tidak adanya tim investigasi *fraud* yang ditunjuk khusus untuk menangani indikasi penyimpangan secara cepat.
3. Kelemahan paling kritis terdapat pada komponen Aktivitas Pengendalian dan Pemantauan dalam kerangka COSO. Data temuan audit internal yang menunjukkan 64% akar masalah berasal

dari kelemahan pengendalian memperkuat kesimpulan ini.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: akses dokumen audit internal yang terbatas hanya pada ringkasan laporan, jumlah informan wawancara yang terbatas pada level staf dan supervisor di bidang keuangan, serta (potensi) bias sosial dalam wawancara karena sensitivitas topik *fraud*. Oleh karena itu, temuan ini lebih mencerminkan kondisi di Kantor Cabang Pekanbaru dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh PT. Angkasa Pura II.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, PT. Angkasa Pura II Pekanbaru disarankan untuk mengambil beberapa langkah perbaikan yang terfokus.

1. Perlu penguatan pada pemisahan tugas pengelolaan kas kecil, antara lain dengan menerapkan sistem *imprest fund* yang ketat dan rotasi staf yang menanganinya.
2. Sistem pelaporan (*whistleblowing*) harus direvitalisasi melalui sosialisasi yang lebih masif dan pemberian jaminan perlindungan yang nyata bagi pelapor, guna membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi.
3. Kualitas pemantauan perlu ditingkatkan dengan menjadwalkan audit internal secara mendadak (*surprise audit*) khusus pada siklus pengeluaran kas, serta membentuk tim kecil beranggotakan personel audit internal yang bertugas sebagai *fraud examiner* untuk menangani laporan atau indikasi awal penyimpangan.
4. Penting untuk mengintegrasikan pembahasan nilai integritas dan prinsip pengendalian internal ke dalam program pelatihan atau komunikasi internal rutin perusahaan guna memperkuat budaya organisasi yang mendukung pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. (2025). Analisis siklus pendapatan terhadap pengendalian internal pada PT Pelangi Wisata Madaniah. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 8(2), 152-162.

- Amrizal, C. M. (2004). *Pencegahan dan pendekslan kecurangan oleh internal auditor* [Paper presentation]. Diklat Investigasi dan Deteksi Kecurangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Indonesia.
- Hery. (2013). *240 konsep penting akuntansi dan auditing*. Gava Media.
- Inapty, B. A., Suhaedi, W., M, R. S. P., & Maharan, N. P. (2025). Sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, gender dan kualitas laporan keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 10(2), 197–213.
- Indriati, Etty. (2014). *Pola dan akar korupsi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Katiandagho, M. G., Runtu, T., & Lambey, R. (2023). Evaluasi pengendalian internal pengeluaran kas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Utara. *Jurnal EMBA*, 11(3), 1053–1061.
- Krismiati. (2015). *Sistem informasi akuntansi* (Edisi ke-4). Unit Penerbitan Dan Percetakan.
- Makal, T. N., Karamoy, H., & Pangerapan, S. (2023). Analisis sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Probesco Disatama Manado. *Jurnal EMBA*, 11(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3>
- Masanae, W., Morasa, J., & Budiarso, N. S. (2022). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 243–252.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edisi ke-3). SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nababan, S. M., & Muktiadji, N. (2022). Efektivitas sistem pengendalian intern atas prosedur penerimaan dan pengeluaran kas lembaga pendidikan: Studi kasus pada Sekolah James Education Center Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 161–170.
- Nainggolan, L. I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Analisis sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas (studi kasus pada PT. Kharisma Surya Semesta). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3118–3128. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i8.1344>
- Reza, R. A. P., Silalahi, A. D., & Saraswati, D. (2021). Analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian keuangan pada Rumah Sakit Mitra Sejati. *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 2(2), 204–212.
- Rohman, A. H. W. T. (2019). *Reformasi birokrasi dan good governance*. Intrans Publishing.
- Rustendi, T. (2017). *Audit internal prinsip dan teknik audit berbasis risiko*. Mujahid Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Valert, G.K. (2017). *Internal audit*. Penerbit Erlangga.
- Wetik, S. W., Baharuddin, & Hasmin. (2018). Analisis pengaruh komitmen dan integritas terhadap kinerja melalui kompetensi pegawai pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Manado. *YUME: Journal of Management*, 1(3), 137-150. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume>

- Wulandari, A., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2023). Penerapan pengendalian internal atas sistem pengeluaran kas pada PT. Varia Usaha Beton. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 11(1), 1–9.
- Wulandari, T., Yani, A., & Simanjuntak, R. (2022). Penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam mendukung pengendalian intern kas pada PT Kahoin dah Citragarment. *Jurnal Bisnis Labora*, 27(3), 1–10.
- Yanti, R. P., & Purnamawati, G. A. (2020). Analisis pengendalian internal dan upaya pencegahan kecurangan akuntansi di sektor perhotelan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 192–204.
- Yulan, P., & Putra, I. S. (2021). Strategi penguatan sistem pengendalian internal untuk menghindari terjadinya fraud pada kas perusahaan. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(2), 181–191.
- Zahara, I., Sumayyah, S., Mubarrok, Z., & Syah, M. E. (2023). Analisis sistem pengendalian internal prosedur pengeluaran kas: COSO ICIF 2013 (studi pada perusahaan konsultan pertambangan migas di Yogyakarta). *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 5(1), 188–200.